



# Kelurahan Dijatah Lebih dari Rp1 Miliar

### Anggaran untuk Kelurahan

- Tiap kelurahan di Kota Yogya akan mendapat kucuran dana cukup signifikan.
- Anggaran untuk kelurahan tahun ini sebesar Rp133 miliar dari OPD.
- Sedangkan dana stimulan wilayah sebesar Rp17 miliar per tahun.
- Total anggaran untuk kelurahan mencapai Rp150 miliar per tahun.
- Penggunaan anggaran diminta harus berdampak nyata kepada masyarakat.
- Terutama kegiatan-kegiatan yang berorientasi konkret terhadap pengurangan kemiskinan.
- Diharapkan tidak ada lagi program-program duplikasi yang tidak efektif.

### ■ Besaran Dana Signifikan Harus Berdampak Nyata

**YOGYA. TRIBUN** - Setiap kelurahan di Kota Yogyakarta, rata-rata mendapatkan alokasi dana di atas Rp1 miliar, baik dana yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun stimulan wilayah.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, meminta agar anggaran yang dialokasikan ke kelurahan dikelola secara terpadu dan mampu mencakup lima hal. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menyelesaikan permasalahan, menata lingkungan, dan mewujudkan rencana pengembangan wilayah di kelurahan.

"Kita minta anggaran yang dialokasikan ke kelurahan dikelola secara terpadu. Dulu masing-masing OPD punya anggaran dan jalan sendiri-sendiri. Kini kami minta OPD bersinergi untuk lima hal tersebut," ujarnya, sesuai lokakarya Data Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (21/2).

ia menjelaskan, bahwa anggaran di kelurahan saat ini sekitar Rp133 miliar dari OPD dan dana stimulan wilayah sebesar Rp17 miliar per tahun. Total anggaran untuk kelurahan mencapai Rp150 miliar per tahun. Di Kota Yogyakarta total ada 45 kelurahan dan 14 kecamatan. "Ini harus *cemantel, tonjo, temoto, ketok, keroso*. Jangan sampai habis lalu bingung uang ini ke mana," tegasnya.

Heroe meminta agar segala bentuk pemberdayaan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Khususnya efek ekonomi. Heroe menuturkan, selama ini pelatihan yang dilakukan masih banyak yang terkesan mengulang tanpa ada tindak lanjut.

"Paling banyak pelatihan tentang membuat kue. Biasanya berhenti. Tidak ada tindak lanjut. Saya harap tahun ini membuat kue, kita minta besoknya pelatihan *packaging*, selanjutnya pameran. Kita kurang kegiatan yang tidak relevan dalam mengentaskan kemiskinan," bebernya.

Ia pun mencontohkan di Demangan, terkumpul 8 orang yang diberi pelatihan untuk mengemudi. Selanjutnya mereka ditugaskan untuk mengantar galon dan gas. Setelah berkenbang, mereka tak hanya mengantar dua jenis barang tersebut tapi juga barang lainnya. "Pesan kami ketika pelatihan juga disiapkan tindak lanjut. Jangan sampai mengulang lagi dan tidak mendapatkan ha-

**Ini harus cemantel, tonjo, temoto, ketok, keroso. Jangan sampai habis lalu bingung uang ini ke mana.**

Heroe Poerwadi  
Wakil Wali Kota Yogya



PERTEMUAN - Heroe Poerwadi menyampaikan poin penting penggunaan anggaran kelurahan dalam, Kamis (21/2).

Tindak Lanjut

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi |
| <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui  |
| <input type="checkbox"/> Jumpa Pers       |

Yogyakarta, .....  
 Plt. Kepala Sekretaris  
 Ttd

● ke halaman 15

## Kelurahan Dijatah Lebih dari

● Sambungan Hal 9

sil." bebernya.

### Tata SDM

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Heri karyawan, mengatakan bahwa berdasarkan Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, mengatur beberapa hal teknis terkait anggaran di kelurahan.

Terkait besarnya, Heri menjelaskan bahwa anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5 persen dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi umum tambahan.

"Sesuai Permendagri 130/2018 juga bahwa lurah selaku Kuasa Pengguna

Anggaran memiliki tugas untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di kelurahan. Saat ini kami sedang masa transisi untuk menata SDM (sumber daya manusia) yang ada," jelasnya.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini belum ada posisi tersebut. Setelah seluruh SDM sesuai dengan amanah Permendagri telah mengisi masing-masing kelurahan, maka Heri menuturkan harapannya dana

stimulan yang selama ini dilakukan OPD dapat digelontorkan seluruhnya ke Kelurahan.

"Harapannya juga nanti tidak ada program yang duplikasi, OPD sudah merencanakan, kelurahan juga merencanakan. Kita sedang terus menyelesaikan SIM Pemberdayaan yang nanti bisa diakses siapa saja sehingga akan ketahuan mana yang belum dan sudah diprogramkan," tandasnya. **(kur)**

## Giwangan Punya Potensi Wisata

**LURAH** Giwangan, Anggit Safrudin menjelaskan bahwa Kelurahan Giwangan memperoleh anggaran sebesar Rp300 juta dari OPD yang menempel pada kecamatan, dalam hal ini kecamatan Umbulharjo. Selain itu juga terdapat dana LPMK di Kelurahan Giwangan sebesar Rp89 juta.

"Itu yang bisa kita kembangkan untuk fisik, nonfisik, dan pemberdayaan. Misalkan pengembangan wisata, gelar potensi seni dan budaya, maupun UMKM," ujarnya.

● ke halaman 15.

## Giwangan Punya Potensi Wisata

● Sambungan Hal 9

Kamis (21/2).

Sementara itu, untuk dana lain baik dari OPD maupun Pemda DIY, dijelaskan Anggit bisa dianggarkan secara langsung pada program tertentu misalkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). "Kalau untuk tahun ini ada Rp110 juta yang khusus un-

tuk pemberdayaan di kelurahan, lainnya ada di kecamatan," ungkapnya.

Anggit mengatakan, Kelurahan Giwangan memiliki potensi yang besar di sektor wisata. Beberapa hari yang lalu, pihaknya telah meluncurkan wisata susur sungai di Taman Pleretan Tirta Wolulas. Namun sebelumnya, pihaknya juga tengah merancang kawasan agro wisata di Sanggrahan, tepatnya di RW 10.

"Kami ada pengembangan

Kampung Agro untuk kelengkeng di Sanggrahan. Itu sudah jalan, dan beberapa kali panen. Panen pertama dihadiri Pak Wagub, Pak Wali (Kota Yogya), Dandim, dan Kapolres," ucapnya.

Anggit menambahkan, pohon kelengkeng ditanam di sepanjang jalan, baik sisi kanan maupun kiri, di halaman kantor, depan masjid, dan di depan rumah. "Kalau sudah tinggi, jalan menjadi rimbun di bawah pohon kelengkeng," ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, ia bersama LPMK tengah memikirkan kemas wisata di sentra kelengkeng tersebut, terutama ketika masa panen tiba. "Nantinya wisatawan bisa petik sendiri. Tapi ini masih belum, masih panen ramai-ramai saja. Juga sedang dipikirkan akan diolah menjadi kelengkeng kaleng atau seperti apa nantinya. Harapannya ini bisa meningkatkan pendapatan warga sekitar," ujarnya kepada *Tri-bun Jogja*. **(kur)**

| Instansi                         | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Badan Perencanaan Pembangunan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Bagian Tapem dan Kesra        |              |       |                 |
| 3. BPKAD                         |              |       |                 |

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005